

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang akan diberikan guna memberikan manfaat baik itu kepada Peneliti selanjutnya maupun kepada Pemerintah.

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan Penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten/kota di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya untuk memaparkan hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam mempersiapkan penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB beserta dampak yang dirasakan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten/kota dinilai cukup baik dalam persiapannya tersebut. Akan tetapi, pada saat berlakunya Opsen PKB dan Opsen BBNKB kemungkinan akan ditemukannya beberapa hambatan.

Berdasarkan dari penelitian ini maka menghasilkan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persiapan penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB telah dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam halnya Bapenda Sumbar semenjak ditetapkannya UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Berdasarkan dengan teori George Edward II, ada 4 (empat) indikator penting yang akan menentukan suatu keberhasilan baik itu dalam persiapannya maupun dalam penerapannya suatu implementasi. Dari variabel-

variabel tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah baik dalam mempersiapkan penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Dari keempat variabel tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam halnya Bapenda Sumbar berhasil memenuhi semua variabel.

a) komunikasi telah dilakukan Bapenda Sumbar baik itu terhadap Pemerintah Pusat maupun terhadap Pihak-pihak yang berkaitan telah berjalan secara efektif dalam penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada setiap Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis komunikasi dan cara berkomunikasi dilakukan oleh Bapenda Sumbar dalam mempersiapkan penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB ini.

b) sumber daya yang tersedia dan disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat cukup memadai dalam kesiapan penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Hal tersebut didukung oleh beberapa indikator cukup memadai yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

c) disposisi atau sikap pelaksana dari Implementator Kebijakan pemerintah pusat ialah cukup baik dalam mempersiapkan segalanya termasuk dalam mempersiapkan kualitas terkait dengan pegawai atau pihak yang akan menangani Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

d) struktur birokrasi Bapenda Sumbar mendukung dalam Penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB di pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hal ini didukung dengan adanya secara lengkap

SOP baik itu dari pusat maupun SOP yang juga telah di buat oleh pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2. Dalam kesiapan Penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam halnya Bapenda Sumbar tidak memiliki hambatan yang dialami selama mempersiapkannya. Akan tetapi, kemungkinan akan terjadi permasalahan pada saat berlakunya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yaitu terkait dengan Masyarakat yang heran dengan kenaikan jumlah pembayarannya, dan pada system perbankan yang kemungkinan nanti akan terjadi permasalahan seperti salah input atau pun permasalahan lainnya. Dampak yang akan di timbulkan nantinya akan mengurangi jumlah wajib pajak yang akan membayar pajak kendaraanya sehinggakan akan berpeluang tidak tercapainya target sesuai anggaran yang telah di tetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dampak lainnya mungkin dikarenakan salah input maka akan mengakibatkan hal yang besar seperti semisalkan terjadi double atau triple entri pada pihak perbankan yang mungkin bisa di akibatkan dengan jaringan atau system yang eror.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam halnya Bapenda Sumbar ialah dengan menyarankan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumbar untuk menganggarkan 1 % anggaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat dan menjelaskan secara detail terkait dengan penambahan jumlah pembayaran tersebut. Selain itu, upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan berkordinasi langsung kepada Pusat mengenai permasalahan yang mungkin cukup besar.

5.2 Implikasi Penelitian

Dalam Penelitian ini, terdapat beberapa implikasi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan dari persiapan suatu kebijakan dan dapat dijadikan standar dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi Pemerintah Pusat untuk mengetahui sudah seberapa jauh kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain narasumber penelitian, keterbatasan data dan informasi, dan belum adanya penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

1. Narasumber Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini melibatkan narasumber yang tepat untuk menggali informasi mengenai Kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Penelitian ini beranggapan bahwa

pemilihan informan adalah individu-individu yang dapat memberikan informasi akurat dan bertanggung jawab langsung atas penerapan Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Namun, dalam penelitian ini Narasumber nya hanya 2 (dua) orang perwakilan saja.

5.4 Saran

Sebagai pertimbangan dan penyempurnaan untuk penelitian selanjutnya, peneliti memberikan beberapa saran bagi yang akan melakukan penelitian selanjutnya seperti pada peneliti selanjutnya, diharapkan dengan melakukan wawancara dengan banyak narasumber akan tetapi tetap kepada bidang yang berkaitan serta melibatkan Kepala Badan dalam penelitian ini. Kemudian untuk peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian diberbagai pemerintah kabupaten/kota yang selaku penerima Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk mengetahui dan menganalisa besaran anggaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB kemudian dapat dibandingkan dengan anggaran yang sebelum berlakunya Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Terakhir kepada peneliti selanjutnya, bisa melakukan penelitian terbaru akan tetapi masih berkaitan dengan Opsen PKB dan Opsen BBNKB, apakah benar terdapat dampak terhadap Pendapatan Asli Daerah.